

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proses pembangunan suatu negara diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan perkapita, atau yang biasa disebut pertumbuhan ekonomi. Indikator yang digunakan untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu pembangunan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkaitan pula dengan peningkatan produksi barang dan jasa, dimana dalam hal ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Todaro (2003) memberikan definisi pembangunan ekonomi merupakan suatu bentuk usaha untuk mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan serta pengangguran, yang merupakan suatu proses multidimensional dalam konteks pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi harus diikuti pula pemerataan ekonomi yaitu dengan pengurangan tingkat ketimpangan. Semakin tinggi ketimpangan ekonomi akan memperlebar sekat pemisah antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan salah satu aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan dan pemerataan menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah, bahkan ketimpangan ini akan menyebabkan

pertumbuhan ekonomi tidak akan bermanfaat dalam pemecahan masalah kemiskinan.

Penyebab ketimpangan antar daerah antara lain: kegiatan ekonomi wilayah, alokasi yang digunakan untuk investasi, rendahnya tingkat mobilitas antar daerah, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, kondisi geografis suatu daerah, dan tersendatnya perdagangan antar daerah (Tambunan, 2003).

Pemerintah baik pusat maupun daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang harus dicapai dalam perencanaan dan tujuan pembangunan. Melalui Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 revisi menjadi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU RI Nomor 33, 2004), merupakan suatu upaya pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini bertujuan agar daerah berlomba-lomba dalam membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah sejak tahun 2001. Kebijakan otonomi daerah di bawah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola rumah tangga masing-masing seperti pengelolaan sumber daya maupun dalam hal pendanaan yang dimiliki dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan pelimpahan kewenangan pembangunan daerah. Maka pembangunan terlebih daerah yang tertinggal dan terbelakang

dapat lebih digerakkan. Daerah dapat menggali potensinya dari aspirasi masyarakat sehingga proses pembangunan secara keseluruhan dapat ditingkatkan dan secara bersama dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah (Sjafrizal, 2008).

Provinsi Bengkulu saat ini memiliki 10 (sepuluh) kabupaten dan kota yang tentunya memiliki berbagai masalah yang harus segera diatasi, seperti masalah pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan perekonomian. Sebagai wilayah yang memiliki banyak kabupaten pemekaran baru, aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan menjadi sangat penting untuk di perhatikan, agar tujuan utama dari pemekaran daerah dapat tercapai sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Periode 2011-2014**

<b>Kabupaten /Kota</b>	<b>Tahun</b>			
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bengkulu Selatan	2.366.414	2.518.785	2.674.076	2.825.625
Bengkulu Tengah	1.916.027	2.033.315	2.146.923	2.262.993
Bengkulu Utara	3.456.408	3.677.271	3.879.885	4.102.110
Kaur	1.507.503	1.589.693	1.686.566	1.767.671
Kepahiang	1.814.120	1.929.216	2.049.378	2.170.619
Lebong	1.417.156	1.494.128	1.576.902	1.662.530
Mukomuko	2.146.532	2.280.578	2.425.616	2.571.315
Rejang Lebong	3.998.379	4.261.235	4.515.850	4.754.886
Seluma	1.919.541	2.042.443	2.159.746	2.274.231
Kota Bengkulu	9.657.223	10.327.321	10.956.459	11.626.658
Provinsi Bengkulu	30.295.054	32.363.038	34.326.372	36.206.679

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 2016

Terlihat pada **Tabel 1.1** diatas bahwa dalam kurun 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terjadi peningkatan PDRB disemua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu merupakan daerah yang memiliki PDRB tertinggi, disusul oleh Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan daerah dengan PDRB terendah adalah Kabupaten Lebong dan diikuti oleh Kabupaten Kaur. Kondisi demikian yang menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari pertumbuhan PDRB antar kabupaten/kota terhadap ketimpangan di Provinsi Bengkulu.

**Grafik 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 (persen)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah 2016

**Grafik 1.1** diatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu pada tahun 2015. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kota Bengkulu selain memiliki nilai PDRB tertinggi juga memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.

Menurut (Arsyad, 2010) salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah adanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk tidak selalu menjadi suatu masalah, justru pertumbuhan penduduk dapat memacu pembangunan ekonomi, semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin meningkatkan potensi pasar domestiknya. Sebagai provinsi yang memiliki banyak daerah otonomi baru, maka perkembangan jumlah penduduk antar kabupaten/kota pun selalu mengalami peningkatan, hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan ketimpangan perekonomian.

Selain itu, ketimpangan yang terjadi di Provinsi Bengkulu tidak hanya terjadi pada Produk Domestik Regional Bruto nya saja, akan tetapi juga terjadi ketimpangan pada aspek pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan yang antar daerah di Provinsi Bengkulu berbeda-beda, rata-rata daerah yang memiliki PDRB tinggi juga diikuti nilai IPM yang tinggi pula. **Tabel 1.2** berikut akan menyajikan nilai Indeks Pembangunan Manusia antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu selama tahun 2011-2014.

**Tabel 1.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi**  
**Bengkulu Tahun 2011-2014**

Kabupaten /Kota	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Bengkulu Selatan	66.50	66.77	67.61	68.28
Rejang Lebong	64.92	65.51	66.11	66.55
Bengkulu Utara	64.61	65.47	66.67	67.27
Kaur	61.85	62.32	63.17	63.75
Seluma	61.01	61.55	62.10	62.94
Mukomuko	63.71	64.16	64.79	65.31
Kepahiang	63.44	63.86	64.44	65.22
Lebong	62.43	62.84	63.15	63.90
Bengkulu Tengah	62.54	63.12	63.71	64.10
Kota Bengkulu	75.31	75.71	76.16	76.49
Provinsi Bengkulu	65.96	66.61	67.50	68.06

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Ketimpangan Perekonomian Di Provinsi Bengkulu Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Tahun 2011-2014)”

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2011-2014?

2. Apakah PDRB, jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap ketimpangan perekonomian di Provinsi Bengkulu tahun 2011-2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Besarnya tingkat ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2011-2014.
2. Besarnya pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan perekonomian di Provinsi Bengkulu tahun 2011-2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan tambahan informasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota didalamnya pada tahun-tahun mendatang.

2. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan termasuk teori-teori yang telah diperoleh selama berada di perguruan tinggi, dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Sebagai bahan informasi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun aspek yang terkait.

## **E. Metode Analisis Data**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah disampaikan maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan teknik ekonometrik dimana melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dari BPS dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

### **2. Metode Analisis Data**

Kesenjangan perekonomian dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan Kabupaten dan provinsi. Adapun tujuan dari analisis ini adalah sebagai bahan untuk melihat adanya ketimpangan antar wilayah maupun sektor ekonomi.

#### **a. Metode Analisis Data Panel**

Untuk menganalisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan di Provinsi Bengkulu tahun 2011-2014 maka penelitian ini menggunakan analisis data panel. Data panel adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek tetapi meliputi beberapa periode. Sedangkan data silang terdiri atas beberapa atau banyak



objek dengan beberapa jenis data. Model regresi data panel bisa dirumuskan sebagai berikut (Winarno, 2009) :

1. Metode *Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS)*

$$RPKP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 IPM_{it} + u_{it}$$

Dimana :

RPKP : Rasio Ketimpangan untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

PDRB : PDRB untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

JP : Jumlah Penduduk untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

IPM : IPM untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

i : Menunjukkan Kota/Kabupaten.

t : Menunjukkan deret waktu 2011-2014

$\beta_{0,1,2,3,4}$  : Koefisien intersep dan slope

u : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati

2. Metode *Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM)*

Model regresi FEM adalah sebagai berikut :

$$RPKP = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_5 d_{1i} + \beta_6 d_{2i} + \beta_7 d_{3i} + \beta_8 d_{4i} + \beta_9 d_{5i} \\ + \beta_{10} d_{6i} + \beta_{11} d_{7i} + v_{it}$$

3. Metode *Random Effect (Random Effect Model/REM)*

Model regresi REM adalah sebagai berikut :

$$RPKP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 I_{it} + \omega_{it}$$

Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat dipilih dengan beberapa uji untuk menentukan manakah antara model PLS, FEM atau REM yang paling tepat untuk digunakan. Uji yang dapat digunakan antara lain:

a. Uji Chow

Hipotesis dalam uji *chow-test/likelihood ratio test*, yaitu :

H<sub>0</sub> : model mengikuti *Common/Pooled*

H<sub>A</sub> : model mengikuti *Fixed Effect*

b. Uji Hausman

Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H<sub>0</sub> : model mengikuti *Random Effect*

H<sub>A</sub> : model mengikuti *Fixed Effect*

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik F

b. Koefisien Determinasi *Adjusted R-Square (R<sup>2</sup>)*

c. Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini merupakan penjabaran landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat identifikasi variabel-variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan model penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, pengujian hipotesis, analisis data dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan serangkaian pembahasan skripsi pada bab IV serta saran-saran yang perlu disampaikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**